



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Nomor : 110/PKS/RRI-PLK/09/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (26-09-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUKTASIM DAROINI, S.PT**
Jabatan : Plh. Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : rripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HANIF**
Jabatan : Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya
Alamat : Jl. Piere Tendean No.2, Palangka Raya
e-mail / Telp : -
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa adlibs iklan sebanyak 4 kali yang disiarkan melalui Program 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 26 sampai dengan 30 September 2023.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, keagamaan, kebencanaan, kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo penyiaran tanggal 24 Oktober 2023.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023.
- (2) Jasa Penyiaran : Adlibs berita panggilan / pemberitahuan sebanyak 4 kali siar (Regular Time) : 4 x Rp 50.000,- = Rp 200.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIh. Kepala LPP RRI Palangka Raya,



MUKTASIM DAROINI, S.PT

PIHAK KEDUA

Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya,

HANIF

Sudah terima
dari : Pengadilan Agama
Palangka Raya
Di -
Palangka Raya

INVOICE

INVOICE NUMBER	DATE
110/PU/INV/RRI-PLK/09/2023	30 September 2023

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1.	Penyiaran Adlibs berita panggilan / pemberitahuan Pengadilan Agama Palangka Raya pada 26 s.d. 30 September 2023 di Programa 1 FM 89,2 MHz LPP RRI Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : a. Hanif, sebanyak 3 Kali b. Mahli, sebanyak 1 Kali	Regular Time	4	50.000,-	200.000,-
YANG DIBAYARKAN					200.000,-
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah					

Palangka Raya, 30 September 2023
Plh. Kepala LPP RRI Palangka Raya,


Muktasim Daroini
NIP. 19671013 198903 1 007 l

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

557352912

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPh BILLING)

Tanggal : 29-09-2023 17:02:40

No. Resi : 73000-73/2023/628963 Petugas : 550000119

Tanggal Buku : 02-10-2023

NTP : 93/51367009

Kode Cabang Pos : 073000

NTPN : 0EA2050DF0E9F0F5

STAN : 675389

Waktu Transaksi : 29-09-2023 17:02:40

Kode Billing : 800230929992165

Nama Wajib Bayar: KRI PALANGKARAYA

K / L : 116

Unit Eselon : 01

Kode Satker : 700146

Jumlah Setoran : Rp. 200.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus ribu rupiah)

NPAK : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PBI/10/2023



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230929992165
Tanggal Billing : 29-09-2023 14:45:05
Tanggal Kedaluwarsa : 06-10-2023 14:45:05
Tanggal Bayar : 29-09-2023 17:02:43
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : RRI PALANGKARAYA
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja : **700146** - RRI PALANGKARAYA
Total Disetor : 200.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Ratus Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **937513675289**
NTPN : **0EA2C55DF0EHFIF5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : RRI Palangkaraya - I. JASA PENYIARAN - B. Adlibs - 1. Regular Time
Kode Akun : 425531 - Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
Jumlah Setoran : 200.000 (IDR)
Keterangan : Pengadilan Agama Palangka Raya, Berupa Adlibs (Regular Time), Periode 26 s.d 30 September 2023, Nomor: 110/PKS/RRI-PLK/09/2023